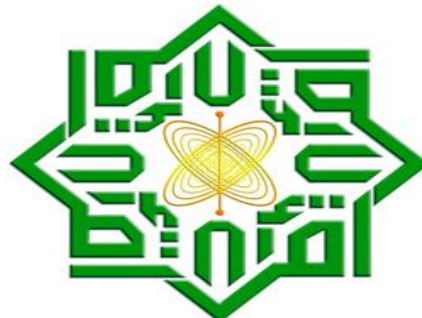




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR
KECAMATAN BATANG TUAKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

OLEH:

CHAIRUNNISA
NIM : 11575205274

**PROGRAM S1
ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR
KECAMATAN BATANG TUAKA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Pada Jurusan Administrasi Negara

OLEH:

CHAIRUNNISA
NIM : 11575205274



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHAIRUNNISA
NIM : 11575205274
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragiri Hilir.
Tanggal Ujian : Jum'at, 27 September 2019

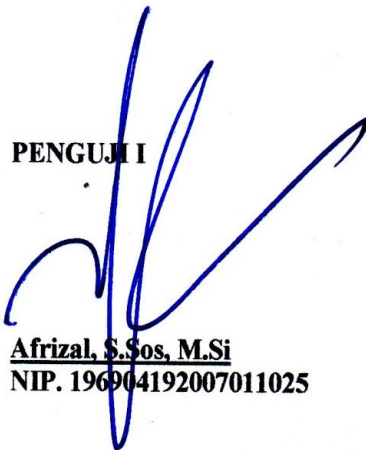
PANITIA PENGUJI

KETUA


Dr. Amyul Muzar, S.HI., M.Ag
NIP. 197702271003121002

ANGGOTA

PENGUJI I


Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 196904192007011025

PENGUJI II


Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130712075



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CHAIRUNNISA
 NIM : 11575205274
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PENGAWASAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
 DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG
 TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING**

Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI :

WAKIL DEKAN 1*
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

KETUA JURUSAN
 Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

CHAIRUNNISA
11575205274

*Skripsi ini berjudul : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.***

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintahan Desa maupun hal penampungan aspirasi masyarakat desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan idea atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu perwakilan masyarakat desa untuk membantu pembangunan pemerintahan desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan Penelitian adalah anggota BPD, Sekretaris Kantor Desadan Masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis kualitatif. Dengan indikator penelitian. BPD di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir belum melaksanakan akan tugasnya secara optimal. Karena adanya salah satu tugas BPD yaitu pengawasan pembangunan-pembangunan di desa yang harusnya anggota BPD turun langsung untuk melihat perkembangan pembangunan desa, namun anggota BPD masih ada yang belum melaksanakan tugas itu. BPD diharapkan mampu memberikan dinamika yang lebih optimal lagi sebagai badan perwakilan penduduk desa, agar terciptanya suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci : Peran, Pengawasan, Pemerintahan Desa



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada saya, dan sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada pembimbing umat Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir”**. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Indra Efendi dan Ibunda Tersayang Ernita yang selalu mencurahkan kasih sayang, berjuta doa yang tiada henti, dorongan dan motivasi kepada penulis dan menjadi inspirasi terbaik dalam setiap langkah penulis. Teruntuk kedua orang tuaku, mungkin selama hidupku ini adalah hadiah pertama yang bisa ku beri saat ini, doakan selalu Ica supaya bisa memberikan kebahagiaan yang lebih banyak lagi kedepannya. Untuk adik-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adikku terkasih, M. Cahyadi Rustam, Firza Mufti Aulia, Azzura Keysha Mallikha, dan M. Nizam Azamy, juga menjadi motivasi ku untuk menyelesaikan tugas ini secepat mungkin, semoga kita bisa sukses dan menjadi anak-anak yang membanggakan untuk orang tua kita aamiin.

Rektor UIN SUSKA RIAU yaitu Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.AG beserta staf.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yaitu Bapak Drs. Muh Said, M.Ag, MM.

Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yaitu Bapak Dr. Kamarrudin, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yaitu Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, MKP.

Pembimbing Konsultasi Skripsi yaitu Bapak Mashuri, MA yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, semangat, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini.

Penasehat Akademik penulis yaitu Bapak Almasri, M.Si.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bapak Kepala Desa Tanjung Siantar beserta BPD dan seluruh pihak yang bersangkutan yang telah memberikan dan mendukung saya untuk menulis skripsi yang saya angkat ini.
11. Teruntuk Penyemangatkku yang tercinta Ari Gusti Randa, Sahabat Guerls ku Dinni Beddy, Nabila Medina Salsabila, dan Bibikku Alviah yang tidak pernah bosan menjadi teman kemanapun, kekampus, keperpus, selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu ada, kalian luar biasa!
12. Keluarga besar ku tercinta yang juga tidak henti-hentinya selalu memberi perhatian untukku, yaitu yang tersayang acik Nana dan om Joni , Om Fathur dan cik Ovi, Bunda Norarita, Om Budi, Kakek dan Nenek ku yang di Tembilahan serta acik-acikku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk doanya. ILOVEYOU!!!
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2015 lokal ANA 'A terima kasih atas kebersamaan selama ini, yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis.
14. Teman-teman KKN Tembilahan Hulu 2018 termacal yaitu Rafi, Fariz, Topan, Aau, Icut, Yulia, Nadia, Lena, Eva dan Dina, semoga kita bisa bertemu dilain waktu dengan membawa kesuksesan masing-masing.
15. Semua pihak yang telah memberikan support dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

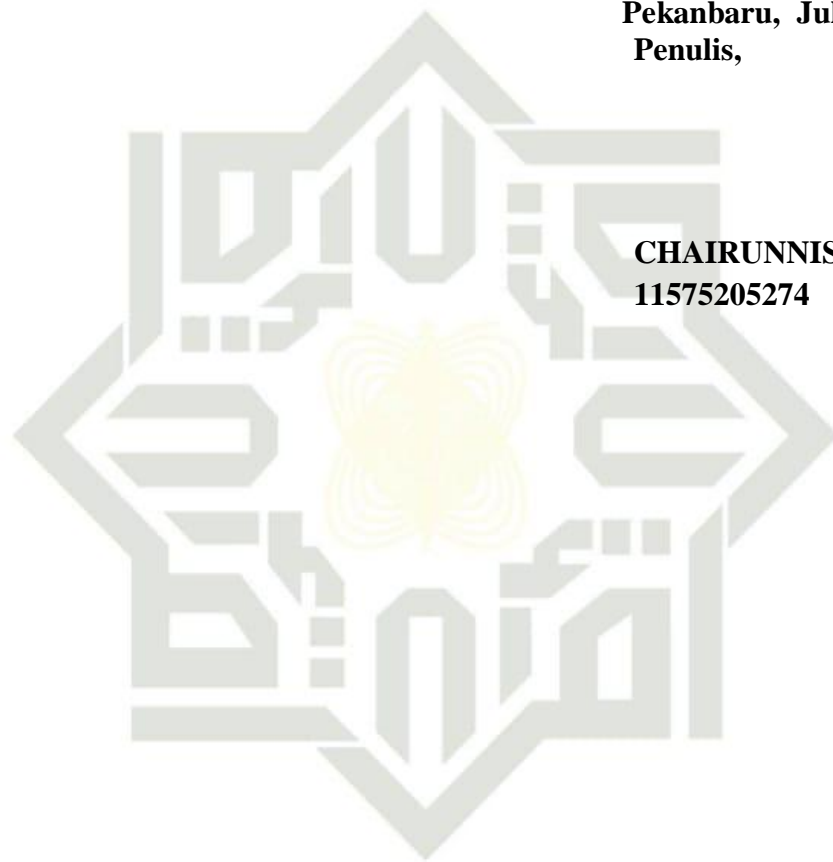


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal'Alamiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juli 2019
Penulis,

CHAIRUNNISA
11575205274



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Pengawasan.....	12
2.1.1 Jenis-jenis Pengawasan	14
2.1.2 Fungsi Pengawasan	16
2.1.3 Tujuan Pengawasan	16
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
2.3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang BPD	22
2.4 Pemerintahan Desa	23
2.5 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Definisi Konsep	30
2.8 Indikator Penelitian.....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2.9 Kerangka Pemikiran	32
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu	33
3.2 Jenis dan Sumber Data	33
3.2.1 Data Primer	33
3.2.2 Data Sekunder	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3.1 Observasi	34
3.3.2 Wawancara	34
3.3.3 Dokumentasi	35
3.4 Informan Penelitian	35
3.5 Analisis Data	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	37
4.2 Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	39
4.2.1 Pemerintahan	40
4.2.2 Penduduk	40
4.2.3 Sosial	40
4.2.4 Mata Pencaharian Penduduk	41
4.3 Letak Geografis dan Latar Belakang Desa Tj. Siantar	42
4.4 Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Siantar	43
4.5 Kedudukan, Tugas dan Wewenang BPD	43
4.6 Struktur Organisasi BPD Tanjung Siantar	44
4.7 Mekanisme Penyusunan dan Penetapan PerDes Tj. Siantar	47



UIN SUSKA RIAU

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran Pengawasan BPD di Desa Tanjung Siantar.....	49
5.1.1 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	49
5.1.2 Pengawasan Kinerja Kepala Desa Terhadap PerDes	56
5.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan BPD	60
5.2.1 Faktor Internal	61
5.2.2 Faktor Eksternal.....	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	63
6.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Data Anggota BPD Tanjung Siantar.....	5
Tabel 1.2 Beberapa Kegiatan BPD Desa Tanjung Siantar.....	7
Tabel 1.3 Tabel Monografi Desa Tanjung Siantar.....	8
Tabel 1.4 Sarana Prasarana Desa Tanjung Siantar.....	8
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.8 Indikator Penelitian.....	31
Tabel 3.1 Daftar Key Informan.....	35
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Desa Kab. Indragiri Hilir.....	41
Tabel 5.1 Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dan Kades	54
Tabel 5.2 Data Kegiatan BPD dalam hal Aspirasi Masyarakat	55
Tabel 5.3 Kegiatan BPD dalam hal Mengukur Perdes	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD Desa Tanjung Siantar	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa adalah agar BPD mampu memahami mekanisme pembuatan Peraturan Desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa tersebut dapat dilaksanakan di desa, karena fungsi BPD dalam hal ini sangat penting. Karena desa telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa itu sendiri. Hal tersebut akan tercermin dari kemampuan desa dalam menyiapkan peraturan desa terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kehidupan di masyarakat.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa adalah salah satu tugas BPD untuk membangun desa melalui masyarakat dengan cara tersebut. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa ataupun BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ataupun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau rapat desa. Cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan cara BPD menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintahan desa pada pertemuan yang dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan bersama, minimal dalam 1 tahun diadakan 3 kali pertemuan.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan desa. Hal tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (1).

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkoordinir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat.

Dalam hal tersebut, pemerintah suatu daerah wajib mengubah daerahnya yang sebelumnya belum maju, menjadi maju. Untuk itu pemerintah telah menjalankan program untuk memajukan desa-desa kecil di daerah. Karena masyarakat di suatu desa yang jauh dari jangkauan tidak mungkin terus berada dalam kondisi yang tertinggal teknologi dan kemajuan infrastruktur.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Meski demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan. Masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin insentif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan di rencanakan jauh dari desa. (*Korten, 1988:247*).

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 12.614,78 km dengan daratan seluas 11.605,97 km. Dari daratan tersebut, 10.740,16 km merupakan daratan berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Luas wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten terbesar nomor dua di Provinsi Riau dengan 20 kecamatan, 197 desa dan 39 kelurahan. Dengan luasnya wilayah dan adanya keterbatasan beberapa penyediaan sarana transportasi dan luasnya wilayah pembangunan yang terkadang masih sulit dijangkau. Untuk itu di setiap desa dibutuhkan adanya masyarakat yang dipilih untuk menjadi perwakilan pemerintah kabupaten menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa diamanatkan. Salah satunya yaitu dengan adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Tanjung Siantar seperti pada tabel 1.1 berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1: Tabel Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Siantar Kec. Batang Tuaka Kab.Indragiri Hilir

No.	Nama	L/P	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan	Agama	Pendidikan Terakhir
1.	Usman	L	P. Kijang/21-05-1969	Ketua	Islam	SMA
2.	Supriadi	L	Sei. Junjangan/ 13-10-1977	Wakil Ketua	Islam	SMA
3.	Muhlis	L	Benteng/02-02-1982	Sekretaris	Islam	SMA
4.	Purwadi	L	Sei. Junjangan/10-05-1980	Anggota	Islam	SMA
5.	Anwar	L	Sei. Meranti/10-12-1978	Anggota	Islam	SMA

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Tahun 2019

Pada tabel 1.1 dijelaskan tentang data dari Ketua hingga anggota BPD Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa merupakan semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Supaya peraturan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan mufakat antara pemerintahan desa dengan badan perwakilan desa, maka diperlukan peraturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Salah satu rapat mufakat antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta beberapa masyarakat setempat yaitu :

1. Dalam rapat membahas 6 pilar adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akhlak dan moral.
 - b. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
 - c. Peningkatan sumber daya manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Peningkatan pelayanan kesehatan.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana desa.
- f. Peningkatan infrastruktur.

Dengan hasil :

- a. Pembangunan dermaga penyebrangan antara Desa Tanjung Siantar dan Tembilahan Kota.
- b. Pemerataan penyediaan sarana prasarana Kantor Kepala Desa, Puskesmas Desa, Masjid Desa, serta Sekolah Dasar dan Madrasah.
- c. Renovasi masjid desa.
- d. Penyediaan listrik yang sudah 24 jam.
- e. Jembatan-jembatan penghubung setiap RT didesa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Namun disisi lain, meskipun memiliki posisi yang strategis, BPD Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian pada observasi terhadap Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD, penulis melihat beberapa masalah sebagai berikut: *pertama*, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja tidak adanya kantor BPD Desa Tanjung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Pada hal yang lebih substansif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja tidak sesuai dengan aturan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kinerja anggota BPD, karena para anggota anggota BPD merasa mereka tidak memiliki tugas yang sangat penting sehingga untuk menjalankan tugasnya, anggota BPD Desa Tanjung Siantar masih belum terlaksana secara optimal.

Kedua, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Misalnya salah satu fungsi sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun kenyataannya, hampir sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut. dalam hal pengawasan kepala desa dan pembangunan desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah mengawasi pembangunan fisik.

Tabel 1.2: Beberapa Kegiatan BPD di Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

No.	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Pokok-pokok kegiatan	Hasil kegiatan	Ket.
1.	Pengawasan terhadap pembangunan dermaga desa	Ketua dan Wakil Ketua BPD	Melihat langsung ke lokasi pembangunan	Telah terlaksana	-
2.	Tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat	Seluruh anggota BPD dan aparat desa	Rapat	Belum maksimal	-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat Kerja	Telah terlaksana	-
4.	Pengawasan terhadap pembangunan masjid desa	Anggota BPD	Melihat langsung ke lokasi pembangunan.	Sedang Terlaksana	Masjid sedang direnovasi

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Tahun 2019

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa ada beberapajenis kegiatan BPD yang tidak semuanya telah terlaksana. Hal ini terjadi karena tidak semua kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh BPD, namun juga dibantu oleh Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa. Sebagaimana kita tahu batas kemampuan pemahaman anggota BPD yang berasal dari desa itu sendiri.

Tabel 1.3 Monografi Desa di Desa Tanjung Siantar Kec.Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

No.	Pertanahan	Luas/Ha
1.	Tanah Kas Desa	3
2.	Pemukaman	3
3.	Pertokoan perdagangan	12
4.	Perkantoran	1
5.	Pasar Desa	1
6.	Tanah Wakaf	13
7.	Sawah pasang surut	50

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.3, Desa Tanjung Siantar memiliki luas wilayah yang berukuran cukup luas, hal tersebut dapat dilihat pada tanah untuk sawah pasang surut yang berukuran 50 Ha.

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Desa di Desa Tanjung Siantar Kec.Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1.	Kantor Desa	1 unit	Baik
2.	Pustu (Puskesmas Pembantu)	1 unit	Baik
3.	SDN 016 Tanjung Siantar	1 unit	Baik
4.	SMP/Madrasah Marginal	1 unit	Baik
5.	Masjid	1 unit	Sedang direnovasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6.	Mushola	3 unit	Sebagian kurang baik
7.	Tower	1 unit	Tidak berfungsi
8.	Dermaga Desa	1 buah	Baik
9.	Jalan lingkungan desa	5 km	Sebagian kurang baik
10.	Gedung Posyandu	1 unit	Baik

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa tidak semua sarana prasarana di desa tersebut dalam kondisi yang baik. Dan dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul “**Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran BPD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Apa hambatan-hambatan BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Hambatan-hambatan BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memenuhi dan menyelesaikan tugas pada jurusan Administrasi Negara.
- b. Sebagai bahan referensi tambahan pustaka fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPD Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdapat definisi konsep, teori-teori referensi yang berkaitan dengan peran pengawasan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian dan sampel (jika perlu) dari metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, dan sebagainya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

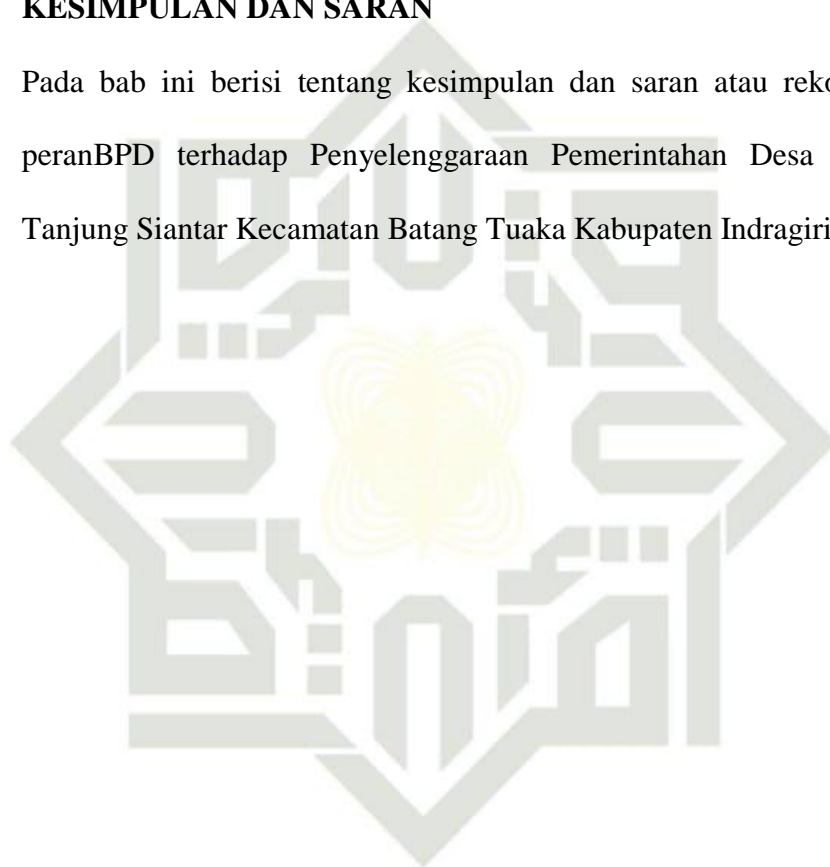
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan peranBPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi peranBPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



UIN SUSKA RIAU



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Definsi Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Seperti menurut George R. Tery (2006 : 395), pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengawasan, tidak hanya melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan, sesuai dengan pendapat Siagian (2006 : 23), pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan.

Pengawasan memiliki fungsi yang sangat banyak dalam hal pembangunan seperti menurut Winardi (2007 : 226), pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapat lain mengatakan Kertonegoro (2008 : 163), pengawasan adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Pengawasan bisa dilakukan dalam segala bidang dan harus dilakukan untuk memulai proses aktivitas yang maksimal seperti pendapat Robbin (2009 : 150), pengawasan adalah suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi.

Sujanto (2011 : 17), pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan apa yang telah dievaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Hadri Broto (dalam Irham Fahmi (2013: 139) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan. Jadi, keseluruhan pengawasan itu adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya dan pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang.

Nitisemito (dalam Fatkhurahman (2014:360) mengatakan agar pengawasan dapat berhasil dengan baik, maka pengawasan yang dilakukan harus realistis, ekonomis, dan efektif. Dengan demikian, pengawasan yang dimaksud



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah aktivitas untuk menentukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan terhadap aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses pemerintahan di desa. Pengawasan dalam pandangan islam dilakukakn untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

Dan katakanlah : *“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mumkin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* .

2.1.1 Jenis-jenis Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap Kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi yang diawasi.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif lebih dimaksud sebagai “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”.

Pengawasan Repensif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun, dimana laporan tentang kegiatan diserahkan hasilnya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan Aktif dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan Pasif, yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran biaya kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- e. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin di temukan.
- f. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.3 Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah di rencanakan.
- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah di gariskan atau di tetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.



- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 1 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 5 tentang anggota BPD :

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Dalam pasal 31, BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam pasal 32, BPD mempunyai tugas :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pasal 36, tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat :

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang. (Hanif Norcholis (2011:77))

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali lagi masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pemimpin BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pemimpin BPD dipilih dari dan anggota BPD serta langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BPD mempunyai hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya adat istiadat masyarakat setempat;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD dilarang :

1. Menjadi pelaksana proyek desa;
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
4. Menyalahgunakan wewenang;
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.

2.3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir tentang BPD

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan.

Dalam pasal 2, susunan organisasi BPD terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

Dalam pasal 3, Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. Jumlah penduduk antara 1.500 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
3. Jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dalam pasal 11, BPD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai peraturan yang berlaku;
6. Menyusun tata tertib BPD;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Pemerintahan Desa

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak pemerintah memiliki kewenangan dan pihak pemerintah memiliki ketaatan. Menurut C.F Strong (dalam Ahmad Riyanto). Pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan kekuatan angkatan militer, yang kedua harus mempunyai kekuasaan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka mempunyai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sedangkan pengertian desa adalah satuan pemerintah yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. (Hanif Nurcholis 2011:01).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Inu Kencana Syfi'ie:dkk 1999:207).

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Dorodjatun Kuntjoro-jakti 1987:3).

Jadi, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan BPD mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, kepala desa bertanggungjawab kepada BPD dan menyampaikan pelaksanaan kepada Bupati. Desa dapat melaksanakan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Fungsi pemerintah pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan pemberian pelayanan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis 2011:103). Yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan desa, publik disini maksudnya yang mempunyai pikiran, persamaan dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa. Pelayanan pemerintahan desa berupa memberikan perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintahan desa memberikan rasa aman dan tentram kepada warga desa. Menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan dan dari bencana alam.

Pemerintahan Desa didalamnya juga termasuk BPD adalah suatu badan untuk membuat kebijakan dan peraturan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana seseorang tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan kepala desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat itu sendiri, dan bukan merupakan hasil rakayasa elit penguasa. Dengan demikian pemerintahan sejenis ini setidaknya mengakui tiga kekuasaan yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa.

Tiga kekuasaan yang dimaksud adalah :

Pertama, kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan rasional, dimana kekuasaan yang datang dari rakyat dan karena itu harus dipertanggungjawabkan.

Kedua, pemerintah desa ialah badan eksekutif desa yang berfungsi menjalankan aspirasi masyarakat, untuk menjawab masalah dan harapan rakyat. Pemerintah desa dalam hal ini adalah bukan sebagai penguasa tetapi sebagai abdi (pelayan atau pemberi pelayanan) masyarakat.

Ketiga, Parlemen Desa (BPD) adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan, posisi Parlemen Desa tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan tidak memiliki otonomi dihadapan rakyat. Parlemen Desa bukan badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan hanya sebagian, sehingga sewaktu-waktu bisa dirasakan terjadi peningkatan suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya.

Hakikat otonomi desa adalah efesiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak, terhadap Kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Kebijakan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan

Dalam pandangan islam, pengawasan di lakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam yaitu:

Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam surah Al-Mujadalah, ayat 7 telah di jelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۚ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidakah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dia-lah keenamnya, dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (AL-Mujadalah:7).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penelitian/ Tahun	Hasil
1.	Upaya BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan	Sri Wijaya 2015	Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, secara umum, Upaya BPD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan sesuai dengan standar kinerja.
2.	Analisis Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.	Muhammad Akhbar 2017	Analisis Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dikatakan kurang berfungsi, karena tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3.	Pelaksanaan Fungsi BPD terhadap Pemerintahan di Desa Sejagat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.	Siti Sofiyah 2014	Pelaksanaan Fungsi BPD terhadap Pemerintahan di Desa Sejagat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis disimpulkan kurang berjalan dengan optimal dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Definsi Konsep

Definisi Konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi operasional merupakan suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut dan yang menjadi perasionalisasi dalam penelitian ini adalah Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang meliputi aspek-aspek definisi konsep dan operasional pada penelitian ini adalah :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil rakyat yang fungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BPD mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.8 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
PeranBadan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir tentang BPD.	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.	a. Menerima masukan dan saran dari masyarakat. b. Mencatat dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat. c. Melaksanakan rapat jika aspirasi belum terrealisasi. d. Pelaksanaan aspirasi masyarakat.
	2. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.	a. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan di desa. b. Mengukur pelaksanaan peraturan yang dibuat bersama Kepala Desa.

Sumber : Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

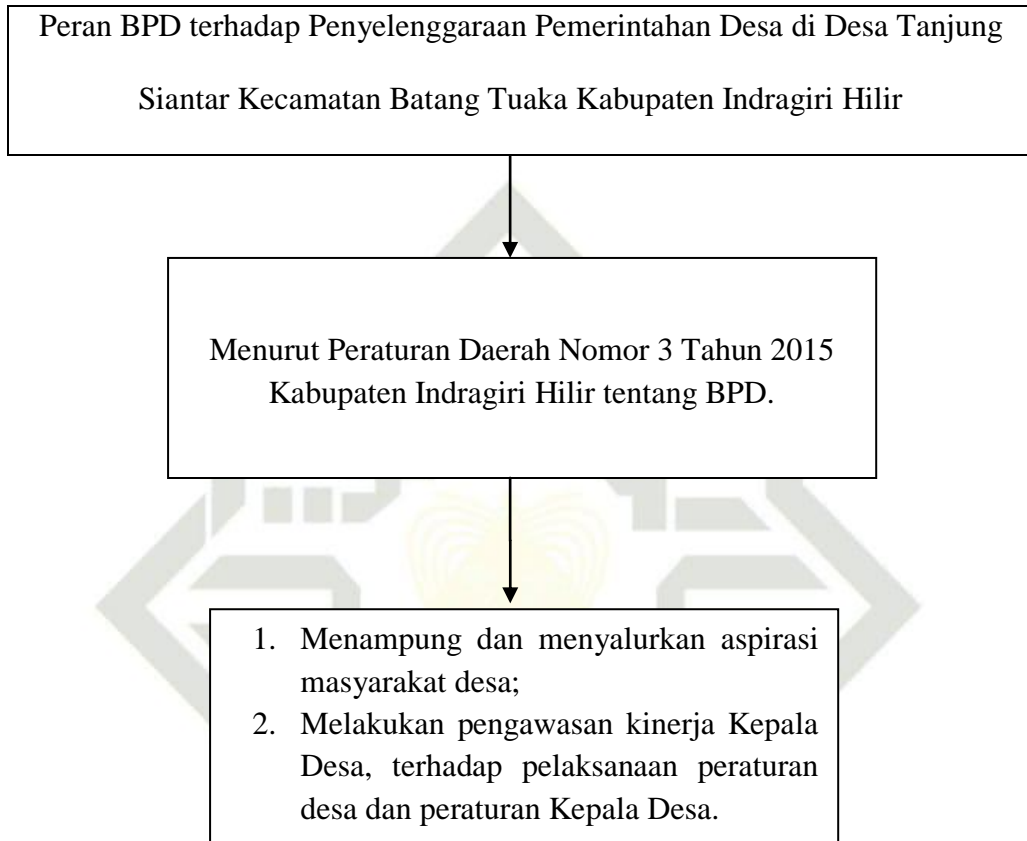
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Tempat penelitian penulis yang dipilih disesuaikan dengan judul penelitian yaitu tentang Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Siantar Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk waktu penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17 Juni 2019 hingga 18 Juni 2019. Serta informasi yang didapatkan oleh penulis berada di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, terdiri atas :

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.



3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literatur, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

3.3.1 Observasi

Untuk mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Peran BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk wawancara responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.



3.3.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

3.4 Informan Penelitian

Key Informan merupakan orang yang benar-benar memahami atau mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Key Informan dipilih dan ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Moleong (2002:97), Key Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain menjadi responden dalam penelitian penulis, Key Informan juga sebagai pemberi informasi yang akurat dan juga terpercaya. Dengan adanya responden atau informan penelitian akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi Key Informan dalam penelitian dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Daftar Key Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa Tanjung Siantar	1
2.	Sekretaris Kepala Desa Tanjung Siantar	1
3.	Anggota BPD	2
4.	Masyarakat	4

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, si peneliti berfokus pada pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Mcmilan dan Schumcher, (2003 : 102), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya penulis mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

Dalam penelitian ini, PeranBPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang diteliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka dibutuhkan data yang terstruktur, berupa deskripsi kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hilir dan Hulu) masih merupakan satu kabupaten Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 (tiga) kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya Taluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan Ibu Kotanya Tembilahan.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu :

- a. Wilayah Tempuling/Tembilahan
- b. Wilayah Enok
- c. Wilayah Gaung Anak Serka
- d. Wilayah Mandah/Kateman
- e. Wilayah Kuala Indragiri
- f. Wilayah Reth

Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 (dua) Kewedanaan masing-masing :

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi kecamatan :
 - 1) Kecamatan Tempuling
 - 2) Kecamatan Tembilahan
 - 3) Kecamatan Gaung Anak Serka
 - 4) Kecamatan Mandah
 - 5) Kecamatan Kateman
 - 6) Kecamatan Kuala Indragiri dengan Ibu Kotanya Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan meliputi kecamatan :

- 1) Kecamatan Enok
- 2) Kecamatan Reth dengan Ibu Kotanya Enok

Dengan terpenuhinya administrasi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah tingkat II yang berdiri sendiri(otonom) setelah melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau (provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 pembentukan Kabupaten/Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1965), maka Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 11,605,97 km². Karena letak Provinsi Kabupaten Indragiri Hilir adalah 33,5 km dan luas perairan laut meliputi 6,318 km.

Sebagai daerah pasang surut, maka terdapat sungai cukup banyak dengan penyebaran sungai hampir seluruh Kecamatan disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pasang surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan “negeri seribu parit”, yang kini digelar dengan “negeri seribu jembatan”.(sumber : wikipedia)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2 Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965. Secara fisiografis sebagian wilayah merupakan Daerah dataran rendah yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa-rawa dengan gambut daerah payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit-bukit dengan ketinggian 5 meter s/d dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Provinsi Riau pada posisi :

- 0°36' : Lintang Utara
- 1°07' : Lintang Selatan
- 104°10' : Bujur Timur
- 102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi).
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menetapkan Visi sebagai berikut *“Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025”*. (sumber : blog Indragiri Hilir)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.1 Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tanggal 14 Juni Tahun 1965 dengan Ibu Kota Tembilahan. Pada tahun ini wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari 20 Kecamatan dan 237 Desa.

4.2.2 Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti Daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak. Perpanjangan usia dan harapan hidup. penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Dilihat komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki 361,325 dan perempuan 342,419.

4.2.3 Sosial

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.



4.2.4 Mata Pencaharian Penduduk

Kebanyakan mata pencaharian daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan bertani, berkebun dan sebagai nelayan, sebagian lahan pertanian (sawah) adalah lahan pasang surut, sedangkan lahan pertanian (bukan sawah) sebagian besar digunakan untuk perkebunan. Dan sebagian masyarakatnya juga bekerja sebagai nelayan dan juga sebagai penambak ikan dan udang.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 12.614,78 km dengan daratan seluas 11.605,97 km. Dari daratan tersebut, 10.740,16 km merupakan daratan berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Luas wilayah kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten terbesar nomor dua di Provinsi Riau dengan 20 kecamatan, 197 desa dan 39 kelurahan, dengan jumlah penduduk 616.347 jiwa dengan sebaran 49 jiwa/km². (sumber : wikipedia)

Berikut adalah daftar wilayah kecamatan dan kelurahan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia.

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Desa Kab. Indragiri Hilir

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.
1.	Keritang	Kotabaru Reteh	17
2.	Kemuning	Selensen	12
3.	Reteh	Pelau Kijang	14
4.	Sungai Batang	Benteng	8
5.	Enok	Enok	14
6.	Tanah Merah	Kuala Enok	10
7.	Kuala Indragiri	Sapat	8
8.	Concong	Concong Luar	6
9.	Tembilahan	Tembilahan Hilir	8
10.	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.
11.	Tempuling	Sungai Salak	9
12.	Kempas	Harapan Tani	12
13.	Batang Tuaka	Sungai Piring	13
14.	Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	12
15.	Gaung	Kuala Lahang	16
16.	Mandah	Khairiah Mandah	17
17.	Kateman	Tagaraja	11
18.	Pelangiran	Pelangiran	16
19.	Teluk Belengkong	Saka Rotan	13
20.	Pulau Burung	Pulau Burung	14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Indragiri Hilir Tahun 2018

Bersadarkan tabel 4.1 diatas, dijelaskan jumlah kecamatan dan kelurahan desa secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.3 Letak Geografis dan Latar belakang Desa Tanjung Siantar

Desa Tanjung Siantar adalah salah satu desa di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai luas wilayah desa sekitar 70 Ha². Desa Tanjung Siantar terdiri dari 2 (dua) dusun, 4 (empat) RW dan 12 (dua belas) RT. Jumlah penduduk sebanyak 1.077 jiwa, diantaranya 529 laki-laki, dan 548 perempuan. Masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Siantar ini mayoritasnya adalah suku Banjar, melayu, dan diikuti oleh suku-suku lainnya seperti jawa, dan bugis. Agama mayoritas masyarakat adalah Islam. Sebagian besar pekerjaan masyarakatnya adalah bertani dan berkebun serta nelayan. Jarak tempuh dari Desa Tanjung Siantar ke pusat Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 5 KM dengan waktu tempuh 5-8 menit dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju penyebrangan ke Desa Tanjung Siantar. Kemudian untuk sampai ke Desa Tanjung Siantar tersebut harus menggunakan sampan kayuh dengan jarak 1 km dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

waktu tempuh 10 menit jika air sungai pasang, namun jika air sungai surut, waktu yang ditempuh bisa mencapai 20-25 menit.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Siantar yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Rawa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Junjangan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Junjangan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Tuaka.

4.4 Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Siantar

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka berdasarkan keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 5 (lima) orang yang apabila jumlah penduduk di desa tersebut berjumlah 1000-1500 jiwa, maka jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desanya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat.

4.5 Kedudukan, Tugas dan Wewenang BPD

1. Kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Tugas dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4.6 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung

Siantar

Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah struktur organisasi disusun disetiap organisasi, maka untuk selanjutnya akan digambarkan melalui bagan. Bagan organisasi akan menunjukkan bagaimana informasi mengalir dari satuan organisasi yang satu ke satuan organisasi yang lain, tingkat tanggung jawab dari mana informasi berasal dan tempat tujuan akhir.

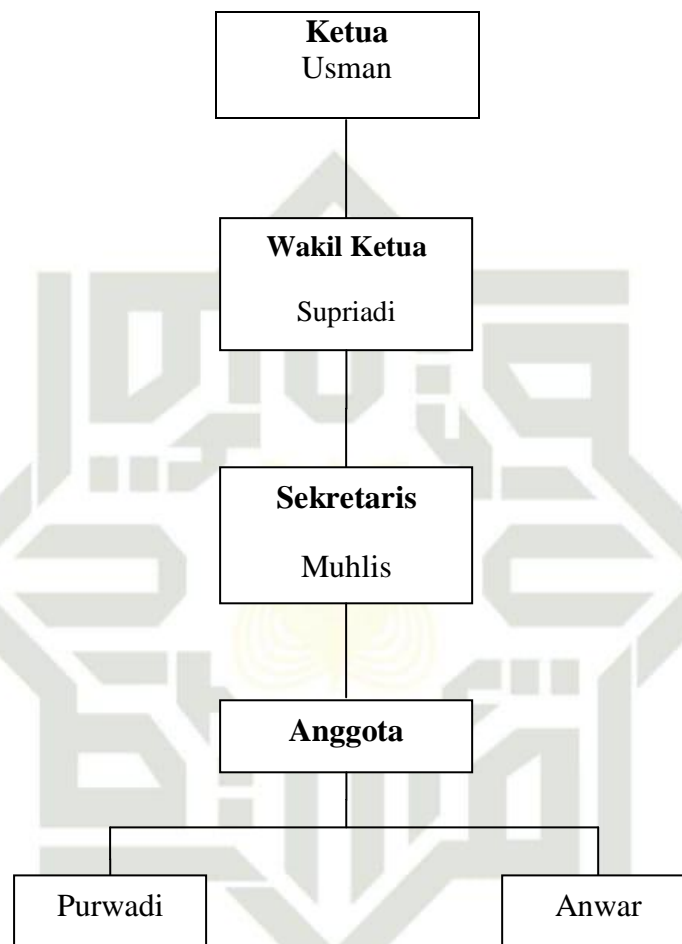
Mulai dari Ketua BPD yang salah satunya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi anggotanya dalam seluruh kegiatan maupun rapat secara internal ataupun eksternal. Selanjutnya Wakil Ketua BPD mempunyai tugas untuk mewakili Ketua BPD jika tidak dapat hadir atau menjalankan tugas sesuai dengan perintah dari Ketua BPD. Sekretaris BPD mempunyai tugas menyusun dan membuat jadwal kegiatan BPD ataupun rapat bersama Kepala Desa dan masyarakat, kemudian menerima segala tugas dari Ketua BPD, serta mampu dalam bidang administrasi. Anggota-anggota BPD mempunyai tugas mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD untuk menjalankan tugas sebagai anggota BPD sebaik mungkin. (sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Kec. Batang Tuaka Kab. Inhil)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Badan permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka



(sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar Kec. Batang Tuaka Kab. Inhil)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.7 Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tanjung Siantar

Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Tanjung Siantar meliputi :

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa.
2. Naskah rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
3. Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menghadiri Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa tersebut.
4. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
5. Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau.
7. Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
8. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam tata tertib Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dan ditandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori belum optimal.

Dikatakan belum optimal karena kurang maksimalnya BPD yang mana masih terdapat hambatan-hambatan internal. Dan yang menjadi hambatan-hambatan dalam Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

A. Pengawasan

Peran BPD dalam pengawasan masih belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan ketika ada pembangunan desa ataupun yang melibatkan BPD untuk turun langsung ke lapangan, masih harus bergantian atau tidak seluruhnya anggota turun langsung. Karena setiap anggota juga terkadang mempunyai kesibukan masing-masing. Inilah yang menyebabkan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa bisa langsung disetujui oleh BPD tanpa melakukan pengawasan untuk kinerja Kepala Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

B. Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam memaksimalkan tugasnya sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- C. Kurangnya ilmu tentang pemerintahan desa disebabkan terbatasnya tingkat pendidikan anggota BPD.

6.2 Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan anggota BPD mampu lebih memaksimalkan tugasnya bekerjasama dengan Kepala Desa serta mengajak masyarakat untuk lebih mau berpartisipasi dalam menangani permasalahan di desa dan melakukan perbaikan-perbaikan serta lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal pembangunan desa yang harus lebih diperhatikan pengawasannya.
2. Diharapkan anggota BPD dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan dapat berpartisipasi serta mengeluarkan aspirasinya.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Terjemahan

- Beratha, N. 1992. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Demokrasi di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: PT.Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Elakhrurrahman. 2014. *Teori 1297*. Pekanbaru : Nofa Percetakan.
- Hamiko, Dwi. 2006. *Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*. Surakarta : Balai Pustaka.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Syafiie, Inu Kencana dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rhineka Cipta.
- Widjaja. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta : Raja Graindo Persada,

Sumber Skripsi/Jurnal :

- Sri Wijaya. 2015. *Upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Angkasa Kecamatan Bandar Pedalangan*.
- Muhammad Allatif. 2013. *Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Muhammad Akhbar. 2017. *Analisis Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*.
- Siti Sofiyah. 2014. *Pelaksanaan Fungsi BPD terhadap Pemerintahan di Desa Sejagat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*.
- Sumartono. 2006. *Kemitraan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.



Undang-undang :

- Undang-undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tufoksi Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (1).
- Peremendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Perda Nomor 3 Tahun 2015 Kabupaten Inhil tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Internet :

- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3654/1/RANDHI%20DIAN%20PURNAMA...pdf>
(diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 10.30 wib)
- <https://media.neliti.com/media/publications/206054-pengaruh-pengawasan-badan-permusyawarata.pdf>(diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 11.40 wib)
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>(diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 11.50 wib)
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indragiri_Hilir
- <https://www.courshero.com/file/p12dmjl/Menampung-dan-menyalurkan-aspirasi-masyarakat-Desa-dan3-Melakukan-pengawasan/>
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir
- <https://ihilkab.bps.go.id/statictable/2018/01/13/68/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2016.html#>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

UIN SUSKA RIAU

Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 01

Dokumentasi bersama Bapak Syaripudin selaku Sekretaris Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar pada wawancara.

UIN SUSKA RIAU



Gambar 03

Dokumentasi Dermaga Penyebrangan Antara Desa Tanjung Siantar Dengan Tembilahan Kota yang sudah di perbaharui pada akhir tahun 2018.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 08

Dokumentasi Dermaga Penyebrangan antara Desa Tanjung Siantar dengan Tembilahan Kota yang lama (sebelum diperbaharui).



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 02

Dokumentasi Peneliti sedang di Depan Kantor Kepala Desa Tanjung Siantar.

UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 06

Dokumentasi bersama guru-guru dan Ibu Bidan yang bertugas dari Tembilahan ke Desa Tanjung Siantar menggunakan alat transportasi Sampan dayung.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 09

Dokumentasi wawancara bersama masyarakat Desa Tanjung Siantar yang akan ikut kegiatan Posyandu Lansia.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umkan dan menyebutkan sumber:



Gambar 05

Dokumentasi Masjid Al-Maghfirah dan salah satu Mushola Raudathul Jannah Desa Tanjung Siantar yang sedang di renovasi.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 04

Dokumentasi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Siantar yang masih dalam kondisi baik dan sebagian sudah dalam kondisi kurang baik.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Gambar 10

Dokumentasi masyarakat yang sedang melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti mencari udang atau potensi hasil sungai dan bertani disawah di Desa Tanjung Siantar.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 07

Dokumentasi wawancara bersama salah satu anggota BPD yaitu Bapak Anwar.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2623/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 05 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Chairunnisa
NIM : 11575205274
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2621/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 05 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Chairunnisa
NIM. : 11575205274
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tanjung Siantar Kecamatan
Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22186
T E N T A N G



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2621/2019 Tanggal 5 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

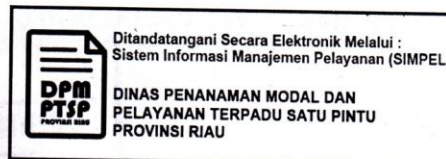
1. Nama : **Chairunnisa**
2. NIM / KTP : **11575205274**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
7. Lokasi Penelitian : **DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 April 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/150

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22186 Tanggal 29 April 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **CHAIRUNNISA**
NIM : 11575205274
Program studi/Jenjang : Administrasi Negara / S1
Alamat : Jl. Pekan Arba Gg. Ceberlin No.02 Tembilahan
Judul Penelitian : **PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Mei s/d 3 Agustus 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 3 Mei 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19640310 198703 1 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA TANJUNG SIANTAR

KECAMATAN BATANG TUAKA KAB. INDRAGIRI HLIR

JALAN PENDIDIKAN TANJUNG SIANTAR NO. 01 TANJUNG SIANTAR

Kodepos 29252

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

NOMOR : 25 / TGS-BT / VI / 2019

Kepala Desa Tanjung Siantar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: CHAIRUNNISA
NIM	: 11575205274
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
Program Studi	: Administrasi Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Suka Karya Perum Graha Rawa Bangun Blok. Q 22 Pekanbaru

Adalah benar telah melakukan Penelitian/Riset dan Pengambilan Data untuk keperluan penulisan Skripsi dengan judul **"PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA TANJUNG SIANTAR KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanjung Siantar, 18 Juni 2019

KEPALA DESA TANJUNG SIANTAR



ZAINAL ABIDIN

BIOGRAFI PENULIS

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CHAIRUNNISA, S.Sos. Lahir pada tanggal 29 Januari 1998 di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Indra Efendi dan Ibu Ernita. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pendidikan Formal :

1. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2008.
2. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMPN 1 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011.
3. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Akhir di SMKN 1 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2014.
4. Menamatkan Pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Tahun 2019.